



**LAPORAN SINGKAT KOMISI VIII DPR RI**  
**Bidang Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian**  
**Pemberdayaan Perempuan & PA RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana**  
**(BNPB) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

---

Tahun Sidang : 2015-2016  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke : --  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat rapat : Terbuka  
Hari/tanggal : Senin, 24 Agustus 2015  
Waktu : 14.00 – 17.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI (Ged.Nusantara II Lt. 2)  
Rapat dengan : Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI  
Acara : Pembahasan Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam.  
iKetua Rapat : **Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si., M.Psi.T.**  
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto,SH  
Hadir : 37 Anggota dari 47 Anggota Komisi VIII DPR RI

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI, Senin, 24 Agustus 2015 dibuka pukul 14.00 WIB, rapat tersebut di pimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ibu. **Hj. Ledia H. Amaliah, S.Si., M.Psi.T.**, rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Pimpinan Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI serta berbagai hal yang terkait dengan Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam.

## II. PEMBAHASAN

- I. Pendahuluan;
- II. Bantuan pada Ditjen Pendidikan Islam;
- III. Mekanisme Pencairan Bantuan;
- IV. Perkembangan Pelaksanaan Bantuan.

## III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan agenda "**Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam**", maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI agar dalam pelaksanaan Tata Kelola Bantuan Pendidikan Islam memperhatikan dan menindaklanjuti dengan sungguh-sungguh pandangan dan pendapat Anggota Komisi VIII DPR RI, sebagai berikut:
  - a. Perlunya penguatan kelembagaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk meningkatkan kualitas tata kelola bantuan pendidikan Islam;
  - b. Meningkatkan peran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk lebih aktif melakukan pembinaan dalam menyalurkan bantuan ke madrasah;
  - c. Meningkatkan sosialisasi bantuan yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI kepada masyarakat, khususnya bantuan kompetensi guru dan santri Wajardikdas Paket A,B dan C;
  - d. Menyampaikan laporan detail (data penerima bantuan, asal daerah, kerjasama universitas, jurusan, dan sebagainya) pada program 5000 doktor kepada Komisi VIII DPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pengawasan;
  - e. Memperhatikan basis Standar Biaya Umum (SBU) atas realisasi program bantuan terhadap guru madrasah;
  - f. Mendorong validasi data pesantren sehingga bantuan pendidikan Islam lebih akuntabel;
  - g. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam agar segera menyelesaikan realisasi bantuan dana BOS semester I untuk madrasah tahun 2015 paling lambat awal September 2015 dan menyampaikan laporan secara berkala kepada Komisi VIII DPR RI;

- h. Melaporkan secara berkala rincian bantuan-bantuan yang disalurkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI kepada Komisi VIII DPR RI sebagai bahan pengawasan;
  - i. Melakukan validasi terhadap penerima bantuan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI sehingga bantuan lebih tepat sasaran.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk meningkatkan realisasi bantuan pendidikan Islam dengan memperhatikan aspirasi daerah.
  3. Pembahasan lebih rinci mengenai tata kelola pendidikan Islam, termasuk di dalamnya bantuan pendidikan Islam, akan dibahas Komisi VIII DPR RI bersama dengan Pejabat Eselon I dan Eselon II Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI pada rapat-rapat Panitia Kerja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam.
  4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk memastikan utang impassing guru swasta dan tunjangan sertifikasi agar dianggarkan pada APBN 2016.

Rapat ditutup pukul 17.00 WIB

Jakarta, 24 Agustus 2015

AN.KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS,

ttd.

YANTO SUPRIYANTO  
NIP. 196305241992031001